



**KABUPATEN KUDUS**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS**  
**141/ 2 / 2023**

**TENTANG**  
**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)**  
**DESA KANDANGMAS**  
**KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

**KEPALA DESA KANDANGMAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa maka dipandang perlu menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Kandangmas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kandangmas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1950 Nomor 41 ) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas system Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 );
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960 );
10. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203 );
11. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633 );
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017;



15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus Kepada Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
22. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
24. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;
25. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 4 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Menengah Tahun 2020-2025;
26. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kepala Desa Kandangmas Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Milik Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- KEDUA** : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Kewenangan sebagai berikut .:

- a. Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA,DPPA,dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa ; dan
- g. Menyetujui SPP.

- KETIGA** : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PKPKD;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kandangmas  
Pada Tanggal 6 Januari 2023  
**KEPALA DESA KANDANGMAS**



**TEMBUSAN :**

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
4. Camat Dawe;
5. Ketua BPD Kandangmas